

Plt Bupati Bogor Lantik 468 ASN di Pemkab Bogor

BOGOR (IM) - Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, melantik ratusan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Senin (13/3). Diharapkan, CASN yang baru dilantik bergerak lebih cepat dalam melayani masyarakat.

"Saya ucapkan selamat dan semoga bisa mengabdikan sepenuh hati dan bergerak lebih lincah untuk melayani masyarakat," ungkap Iwan Setiawan, Senin (13/3).

ASN yang dilantik ini sebanyak 468 Calon. Mereka akan menjadi PNS di lingkungan Pemkab Bogor.

Iwan mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membu-

tuhkan ASN yang kompeten untuk membangun birokrasi yang kuat, dan memberikan pelayanan yang prima di era serba maju, serba cepat, serba digital saat ini.

"Semoga PNS muda yang baru dilantik berani membuat perubahan, berinovasi, dan berkolaborasi," tegas Iwan Setiawan.

Sebagai informasi, dari ratusan PNS yang dilantik, kebanyakan tenaga kesehatan. Karena itu, Iwan berharap semua bisa berkontribusi maksimal untuk membangun Karsa Bogor Sehat, demi meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. ● **gio**

Bupati Bandung Geram Logo Pemkab Dicatut Panitia Offroad di Rancaupas

SOREANG (IM) - Bupati Bandung, Dadang Supriatna geram dengan pencatutan logo Pemerintah Kabupaten Bandung pada event motor trail di objek wisata alam Rancaupas Kecamatan Rancabali, pada Minggu (5/3) lalu.

"Awalnya saya tak dapat kabar sama sekali, tentang event trail itu. Saya tahunya pada hari Selasanya," kata Dadang Supriatna di Soreang, Senin (13/3).

Seperti diketahui, event motor trail off road di objek wisata alam Rancaupas itu, viral hingga terjadi pembakaran tiga unit motor milik panitia.

Motor yang disediakan sebagai hadiah peserta itu, dirusak dan dibakar peserta karena kecewa terhadap penyelenggara.

Tak hanya itu saja, even motor trail tersebut panjang. Sebab terdapat lahan yang ditanami bunga edelweis rawa di Ranca Upas rusak parah. Persoalan lain

pun muncul, di mana terdapat dugaan pencatutan logo Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam bener, balihu, atau spanduk even tersebut.

Saat disinggung pencatutan logo Pemerintah Kabupaten Bandung, Dadang mengatakan, sebenarnya sudah meminta (untuk memeriksa) kepada Kapoles, dan menurutnya ini sedang diproses.

"Terus terang sama sekali tidak ada informasi lebih dulu, baik itu dengan Dispora, termasuk dengan Dinas lingkungan hidup juga tak ada," ujarnya.

Dadang melanjutkan, terkait kerusakan di Ranca Upas Pihaknya telah menginstruksikan DLH untuk memperbaikinya, dengan ditanami lagi bunga rawa.

Dadang juga membenarkan, jika untuk saat ini objek wisata alam Rancaupas, ditutup sementara gara-gara even motor trail tersebut. ● **pra**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



SEBARAN ABU VULKANIK GUNUNG MERAPI

Abu vulkanik Gunung Merapi menutupi atap rumah warga di Jarakah, Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (13/3). Selain sisi barat lereng Gunung Merapi, dampak sebaran abu vulkanik dari awan panas guguran Gunung Merapi juga mengenai desa di lereng Gunung Merbabu.

Groundbreaking Jalan Khusus Tambang Mundur Lagi ke Bulan Mei

Jalan khusus tambang sepanjang kurang lebih 12,5 Km itu saat ini sedang penataan atau *cut and fill* oleh PT Jayabaya Grup selaku investor utama. Keberadaan jalan khusus tambang diharapkan menjadi solusi permasalahan yang ada selama ini seperti rusaknya jalan, rawannya kecelakaan lalu lintas, debu, kemacetan, dan terjadinya pungutan liar.

BOGOR (IM) - Ground breaking jalan khusus tambang terus molor dari jadwal. Terbaru, Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin men-

ngan terbitnya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, langsung diundaklanjuti oleh jajarannya dengan mengurus perizinannya secara lengkap agar pembangunan jalan khusus tambang bisa segera dimulai.

"Kita lebih baik mundur setelah Hari Raya Idul Fitri, yang jelas administrasi dan perijinan tepatnya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia jalan khusus tambang sebagai jaminan investasi harus sudah terbit dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)," tutur Burhanudin kepada wartawan, Senin (13/3).

Burhanudin menerangkan lampu hijau dari BKPM de-

ngan terbitnya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, langsung diundaklanjuti oleh jajarannya dengan mengurus perizinannya secara lengkap agar pembangunan jalan khusus tambang bisa segera dimulai.

"Perijinan lengkap jalan khusus tambang sedang berproses di Pemkab Bogor," terangnya.

Dari informasi yang dihimpun, bahwa sebagian besar lahan jalan khusus tambang sudah dibebaskan oleh PT Jayabaya Grup, sedangkan lahan di usaha tambang dalam proses negosiasi antara PT Jayabaya Grup dengan pemegang ijin usaha tambangnya.

Jalan khusus tambang sepanjang kurang lebih 12,5 Km itu saat ini sedang penataan atau *cut and fill* oleh PT Jayabaya Grup selaku investor utama.

Keberadaan jalan khusus

tambang diharapkan menjadi solusi permasalahan yang ada selama ini kurang lebih selama puluhan tahun.

Permasalahan itu berupa rusaknya jalan, rawannya kecelakaan lalu lintas, debu, kemacetan, dan terjadinya pungutan liar.

Jalan yang diperuntukkan khusus kendaraan tambang bukanlah jalan tol, para penggunanya bersama pengelola jalan khusus tambang nantinya akan menentukan besarnya iuran untuk masuk ke jalan khusus tambang.

Proyek jalan khusus tambang, merupakan janji Ridwan Kamil semasa ia mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Barat atau pada Tahun 2018 lalu. Ground breaking jalan yang pertama di Indonesia ini diharapkan dilaksanakan sebelum Ridwan Kamil habis masa jabatannya, yaitu pada Bulan September 2023. ● **gio**



IDN/ANTARA

PENYERAHAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN BAGI WARGA BINAAN

Warga binaan menunjukkan KTP di Lapas Kelas II A Banceuy, Bandung, Jawa Barat, Senin (13/3). Pemkot Bandung menyerahkan 53 identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga binaan Lapas Kelas II A Banceuy guna memberikan pelayanan kepada semua kalangan masyarakat dan agar warga binaan dapat mengikuti Pemilu 2024 mendatang.

Pemerintah Provinsi Jateng Buka Pendaftaran Mudik Gratis

SEMARANG (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa tengah menyiapkan puluhan bus untuk program mudik gratis menghadapi lebaran tahun ini. Masyarakat yang ingin ikut program ini bisa mulai mendaftar.

Rencananya, Pemprov akan menyediakan puluhan hingga ratusan bus dari Jakarta menuju berbagai daerah di Jateng. Para calon pemudik lebaran yang berminat ikuti program Mudik Gratis, bisa mendaftar di <https://pedamatang-penghubung-jatengprov.go.id/swa>.

Syarat mengikuti program Mudik Gratis ini, calon pemudik cukup memiliki KTP wilayah Jateng atau kelahiran Jateng. Namun bagi mereka yang mendaftar dalam keluarga, dibatasi maksimal empat orang.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan mudik gratis bagi warga perantauan akan dimulai Senin (17/4) dari Museum Purna Bhakti Peristiwa Taman Mini Indonesia

Indah (TMI) Jakarta Timur. Puluhan bus itu, kata Ganjar akan membawa pemudik hingga ke daerah asal seperti Solo Raya, Semarang Raya, Banyumas, Pekalongan, Kedu dan Pati.

"Bahkan juga disiapkan balik gratis, untuk sementara tersedia 43 unit bus dan dapat bertambah lagi sesuai kebutuhan," imbuhnya.

Ganjar mengungkapkan pada lebaran tahun ini, diperkirakan 12 juta warga Jateng akan mudik ke 35 daerah asal, sehingga perlu persiapan matang tidak hanya sarana dan prasarana serta infrastruktur. Dalam rangka kelancaran arus mudik, lanjut Ganjar Pranowo, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan terus dikebut, sehingga pada H-10 semua ruas jalan dan jembatan telah siap dilintasi kendaraan pemudik.

"Saya minta kepada seluruh kepala daerah, untuk percepatan pembenahan jalan dan jembatan demi kelancaran arus mudik lebaran mendatang," ujarnya. ● **pra**

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan Apresiasi Pilkades Serentak

BOGOR (IM) - Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang II tahun 2023, di 36 desa 26 kecamatan Kabupaten Bogor.

Diharapkan Pilkades tersebut terciptanya suasana aman dan kondusif, mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan suara yang berjalan dengan lancar.

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, saat mengakhiri monitoring rekapitulasi perhitungan cepat secara daring melalui Aplikasi Hitung Cepat (SITEPAT), di Cisarua, Minggu (12/3).

Berdasarkan hasil hitungan sementara yang dirilis DPMD Kabupaten Bogor, pukul 18.58 WIB persentase partisipasi masyarakat terhadap pesta demokrasi Pilkades serentak gelombang II tahun 2023 ini cukup tinggi.

Dari total 290.526 hak pilih terdapat 230.407 atau 79,31% yang menggunakan hak suaranya.

Iwan mengungkapkan, pelaksanaan Pilkades

serentak berlangsung aman dan kondusif. Partisipasi masyarakat terhadap pesta demokrasi tingkat desa juga sudah cukup tinggi.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab mengatakan bahwa proses perhitungan telah selesai dilaksanakan bersama tim Pusat Data dan Informasi Pilkades serentak Kabupaten Bogor.

Seluruh informasi data terutama perolehan suara dari tiap calon tersebut akan menjadi dasar sebagai laporan ke pimpinan sambil menunggu data resmi karena data resmi itu sekarang sedang dilakukan di wilayah, selanjutnya data dilaporkan ke BPD.

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin mengatakan, penggunaan aplikasi SITEPAT sangat membantu dalam menghimpun data perolehan perhitungan suara lebih mudah dan cepat. Dengan teknologi digital kecepatan informasi bisa dengan mudah dapat diketahui dan diperoleh masyarakat.

"Sistem ini kedepan bisa menjadi pilot project untuk

kegiatan pesta demokrasi yang lebih besar. Seperti Pilpres, Pileg dan Pemilihan Bupati di tahun yang akan datang. Sehingga rekapitulasi perhitungan suara bisa dilakukan dengan cepat," tukas Imanudin.

Jangan Eforia

Iwan menghimbau para pendukung tidak euforia berlebihan, guna menjaga ketertiban dan kondusifitas pelaksanaan Pilkades serentak gelombang II di Kabupaten Bogor.

"Saya himbau para Camat untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat tidak euforia berlebihan. Terutama kepada calon yang suaranya unggul, ini kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dan tetap menjaga kondusifitas dan keamanan," jelas Plt. Bupati Bogor.

Ia juga meminta kepada Forum Koordinasi Kecamatan (Forkopimcam) agar melakukan pengamanan ekstra di rumah para calon Kades baik yang suaranya unggul maupun yang tidak unggul. ● **gio**



Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan imbau masyarakat jaga kondusivitas jagan euforia berlebihan.

Wacana DOB Cirebon Timur Terkendala Moratorium

CIREBON (IM) - Proses untuk mencapai Cirebon Timur menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) dari bawah terus berlanjut. Selain rekomendasi DPRD ke Pemda untuk melakukan kajian terakit DOB Cirebon Timur sudah dilakukan, sebagai pertemuan dan audiensi antar pihak-pihak lain terus berjalan.

Namun, Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin yang salah satunya membicarakan pemertinahan memberikan kabar buruk. Dia menyebut, wacana DOB Cirebon Timur ini terkendala moratorium. Alhasil, tidak mungkin secepatnya bisa terbentuk pemekaran.

"Kabar buruknya, sampai hari ini moratorium belum dibahas mendalam, termasuk pembebas DOB Cirebon Timur," kata Yanuar Prihatin, saat silaturahmi ke PPI Al Mawahib, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Senin (13/3).

Menurutnya, pemekaran suatu daerah prinsipnya ada usulan dari bawah. Sebab jika usulannya dari atas belum tentu cocok juga diterima ke bawahnya. Hanya saja, memang prosedurnya harus diikuti, terkait standardisasi persyaratannya juga harus dipenuhi.

Politikus PKB ini juga mengatakan, setelah standardisasi persyaratan terpenuhi, segera untuk mengajukan ke Jakarta bisa melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI atau juga bisa melalui usulan ke Komisi II DPR RI.

Yanuar juga mengatakan, Komisi II DPR RI dengan Kemendagri RI saat ini ten-

gah menyelesaikan dasar hukum semua provinsi dan juga Kabupaten/Kota se-Indonesia. Di mana dasar hukum yang ada sudah tidak berlaku.

"Contohnya di beberapa provinsi dasar hukumnya masih menggunakan RIS (Republik Indonesia Serikat). RIS sendiri sudah bubar, tapi kok masih dipakai," ungkapnya.

Yanuar menilai, permasalahan dasar hukum mungkin dianggap sepele, namun berkaitan dengan hukum dianggap sudah tidak kuat lagi. Artinya, kalau provinsi dasarnya masih menggunakan RIS, secara otomatis kabupaten dan kota di bawahnya akan ikut cantolan hukumnya.

"Kecuali kabupaten atau kota yang dibentuk pada zaman reformasi. Namun untuk yang dibentuk pada zaman orde baru dan orde lama, sudah dipastikan masih menggunakan dasar hukum yang lama," ucapnya.

Yanuar juga mengatakan, untuk ajuan DOB yang sudah ada masih melakukan proses namun belum bisa diputuskan menjadi DOB. Dirinya juga belum bisa memastikan kapan moratorium itu dicabut sehingga keputusan DOB bisa dilaksanakan secepatnya.

Disinggung mengenai apakah Cirebon Timur layak atau tidak menjadi DOB, politikus yang memiliki darah Cirebon ini mengaku, Cirebon Timur sudah cukup layak untuk dimekarkan karena Kabupaten Cirebon sendiri merupakan daerah yang cukup luas sama halnya dengan wilayah Garut, Bogor.

"Kalau saya boleh saran kan untuk tetap melanjutkan prosesnya saja dulu, seperti kajian dan lain sebagainya," tukasnya. ● **pra**